

KATA PENGANTAR

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta 5 (Lima) Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi dan UPT Kopri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Februari 2018
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

ttd

H. Syamsuddin Lologau
NIP 195908051984091002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	12
B.1. Pendapatan	12
B.2. Belanja	12
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	15
C.1. Aset Lancar	15
C.2. Aset Tetap	17
C.3. Aset Lainnya	19
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	19
C.5. Ekuitas	20
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	21
D.1. Pendapatan LO	21
D.2. Beban Pegawai	23
D.3. Beban Persediaan	23
D.4. Beban Barang	23
D.5. Beban Jasa	23
D.6. Beban Pemeliharaan	23
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	23
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	24
E.1. Ekuitas Awal	25
E.2. Surplus (Defisit) LO	25
E.3. Mutasi RK PPKD	25
E.4. Koreksi Ekuitas	25
E.5. Ekuitas Akhir	25
F. Pengungkapan Lain-lain	25
LAMPIRAN	

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 (Lima) Suku Badan Kepegawaian Kota Tahun 2017 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berjalan sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Februari 2018
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

H. Syamsuddin Lologau
NIP 195908051984091002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Gabungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak mengganggu penerimaan pendapatan.

Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp.128.283.646.873,- menurun Rp. 422.383.972.417,- dibandingkan belanja pada Tahun 2016 sebesar Rp.550.667.619.290,-. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 BKD Provinsi DKI Jakarta menanggung belanja pegawai CPNS sebanyak 5.055 orang sedangkan pada tahun 2017, belanja pegawai CPNS tersebut telah dianggarkan di SKPD masing-masing.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Niai Aset Konsolidasi per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp.4.259.951.488,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.520.657.074,-, Aset Tetap sebesar Rp.3.247.465.169,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.491.829.245,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing – masing sebesar Rp.6.979.489.841,- dan Rp.(131.771.380.476,-). Nilai RK PPKD sebesar Rp.129.051.842.123,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak mengganggu penerimaan pendapatan. Jumlah beban untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.133.868.398.035,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(133.868.398.035,-). Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak mengganggu Kegiatan Non-Operasional.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal Gabungan pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp.2.097.319.560,- dikurangi Perubahan Ekuitas sebesar Rp.(4.816.857.913),-. Sehingga Ekuitas Entitas Konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.(2.719.538.353),-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis Akrua.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, UPT KORPRI DAN 5 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 31 Desember 2017	%
1	2	3	4	5
<u>PENDAPATAN</u>	-	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	B.1			
<u>BELANJA</u>	-			
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	B.2.1	114.743.137.360	113.869.532.723	99,24
Belanja Barang dan jasa	B.2.2	17.705.861.109	13.715.463.923	77,46
Jumlah Belanja Operasi		132.448.998.469	127.584.996.646	96,33
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah		-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.3	857.020.988	698.650.227	81,52
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-
Jumlah Belanja Modal		857.020.988	698.650.227	81,52
JUMLAH BELANJA		133.306.019.457	128.283.646.873	96,23
SURPLUS/DEFISIT		(133.306.019.457)	(128.283.646.873)	96,23

II. N E R A C A

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, UPT KORPRI DAN 5 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		31-Des-17	31-Des-16
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Piutang Kelebihan Pembayaran		-	-
Kepada Pihak Ketiga			
Penyisihan Piutang Kelebihan		-	-
Pembayaran kepada Pihak Ketiga			
Persediaan		520.657.074	602.766.771
Jumlah Aset Lancar	C.1	520.657.074	602.766.771
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin		13.582.483.943	12.980.246.312
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		41.115.450	41.115.450
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		(10.376.144.224)	(9.601.325.448)
Jumlah Aset Tetap	C.2	3.247.465.169	3.420.036.314
ASET LAINNYA			
Aset lain-lain		491.829.245	490.958.045
Jumlah Aset Lainnya	C.3	491.829.245	490.958.045
JUMLAH ASET		4.259.951.488	4.513.761.130
<u>KEWAJIBAN</u>			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
Utang Belanja		6.979.489.841	2.416.441.570
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.979.489.841	2.416.441.570
JUMLAH KEWAJIBAN	C.4	6.979.489.841	2.416.441.570
<u>EKUITAS</u>			
EKUITAS			
Ekuitas		(131.771.380.476)	2.097.319.560
RK PPKD		129.051.842.123	-
Jumlah Ekuitas	C.5	(2.719.538.353)	2.097.319.560
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.259.951.488	4.513.761.130
		-	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, UPT KORPRI DAN 5 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	2	3	4
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>	-		
<u>PENDAPATAN</u>	-	-	-
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah		-	-
Pendapatan Retribusi Daerah		-	-
Lain-lain PAD yang sah		-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		-	-
		-	-
JUMLAH PENDAPATAN	D.1		
Jumlah		-	-
<u>BEBAN</u>	-		
BEBAN OPERASI			
Beban Pegawai	D.2	118.432.580.994	585.074.656.457
Beban Persediaan	D.3	2.115.697.591	3.013.564.082
Beban Barang	D.4	2.845.451.750	5.817.985.201
Beban Jasa	D.5	8.644.403.059	10.543.352.730
Beban Pemeliharaan	D.6	192.021.220	239.724.990
Beban Perjalanan Dinas	D.7	-	124.676.214
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.638.243.421	1.584.736.013
Jumlah Beban Operasi		133.868.398.035	606.398.695.687
JUMLAH BEBAN		133.868.398.035	606.398.695.687
SURPLUS/DEFISIT - LO		(133.868.398.035)	(606.398.695.687)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, UPT KORPRI DAN 5 SUKU BADAN KEPEGAWAIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	2	3	4
Ekuitas – LO		2.097.319.560	(3.743.925.974)
RK PPKD		0	14.310.849
Jumlah Ekuitas Awal	E.1	2.097.319.560	(3.729.615.125)
Surplus/Defisit LO	E.2	(133.868.398.035)	(606.398.695.687)
Mutasi RK PPKD	E.3	129.051.842.123	612.335.848.967
Koreksi Ekuitas	E.4	(302.001)	(110.218.595)
Perubahan Ekuitas		(4.816.857.913)	5.826.934.685
Ekuitas Akhir:			
Ekuitas – LO		(131.771.380.476)	(610.252.840.256)
RK PPKD		129.051.842.123	612.350.159.816
JUMLAH EKUITAS AKHIR	E.5	(2.719.538.353)	2.097.319.560

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah, yang tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten pemerintah.

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2014 dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BKD;

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan tugas administrasi BKD;

c. Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan serta pendayagunaan pegawai;

d. Bidang Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai;

e. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan pensiun pegawai;

f. Bidang Pengendalian Pegawai

Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pegawai;

g. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

h. Unit Pelaksana Teknis

Melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi BKD.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BKD.

Sejak 1 Januari 2016 Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi tidak lagi merupakan unit Kerja BKD pada Kabupaten Administrasi. Ketentuan pencabutan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pasal 74 huruf b.

Sejak 1 Januari 2017, nomenklatur Kantor Kepegawaian Kota berubah menjadi Suku Badan Kepegawaian Kota berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Sejak 1 Januari 2017, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Korpri dan berkedudukan dibawah Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 292 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan.

A.3. Basis Akuntansi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan saat memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konversi – konversi, aturan – aturan, dan praktek – praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan entitas pelaporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan – kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas daerah
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan harga pembelian.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

d. Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam menyajikan laporan keuangan.

Pertama, pos – pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual.

Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015 merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI KEUANGAN

B.1. Pendapatan

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

B.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi belanja Gabungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.128.283.646.873,- atau 96.23% dari Anggaran sebesar Rp.133.306.019.457,-

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Gabungan BKD Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Kantor Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.113.869.532.723,- atau mencapai 99,24% dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp.114.743.137.360,-

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam Tabel berikut:

Belanja Pegawai

KODE REK	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	REALISASI							LEBIH / (KURANG)	%
			BKD	K3 - JAKPUS	K3 - JAKUT	K3 - JAKBAR	K3 - JAKSEL	K3 - JAKTIM	K3 - KEP SERIBU		
5.1.1.01.03.001	Gaji Pokok	12.792.286.000	12.615.852.220	-	-	-	-	-	-	176.433.780	98.62%
5.1.1.01.03.002	Tunjangan Keluarga	1.086.004.000	1.046.227.878	-	-	-	-	-	-	39.776.122	96.34%
5.1.1.01.03.003	Tunjangan Jabatan	537.108.000	528.970.000	-	-	-	-	-	-	8.138.000	98.48%
5.1.1.01.03.005	Tunjangan Fungsional	113.832.000	113.832.000	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
5.1.1.01.03.006	Tunjangan Umum	522.398.000	508.195.000	-	-	-	-	-	-	14.203.000	97.28%
5.1.1.01.03.008	Tunjangan Khusus (PPH)	9.292.407.360	9.292.407.360	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
5.1.1.01.03.009	Tunjangan Beras	696.680.000	641.351.520	-	-	-	-	-	-	55.328.480	92.06%
5.1.1.01.03.010	Pembulatan Gaji	175.000	156.283	-	-	-	-	-	-	18.717	89.30%
5.1.1.01.03.014	Tunjangan Kinerja	72.000.000.000	71.428.849.539	-	-	-	-	-	-	571.150.461	99.21%
5.1.1.01.03.016	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian	14.910.386.000	14.909.605.123	-	-	-	-	-	-	780.877	99.99%
5.1.1.02.05.001	Tunjangan Penghargaan Pegawai	224.306.000	224.305.800	-	-	-	-	-	-	200	100.00%
5.1.1.10.01	Tunjangan Transport Pejabat	2.567.555.000	2.559.780.000	-	-	-	-	-	-	7.775.000	99.70%
JUMLAH		114.743.137.360	113.869.532.723	-	-	-	-	-	-	873.604.637	99.24%

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri sampai dengan bulan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar 77,46% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Rincian realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017

SKPD/UKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	8.627.207.696	7.089.341.675	82.17%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	191.187.412	156.289.899	81.75%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	231.646.081	181.656.510	78.42%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	358.981.694	306.032.400	85.25%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	438.246.170	390.426.715	89.09%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	313.365.343	260.909.975	83.26%
UPT Korpri	7.545.226.712	5.330.806.749	70.65%
JUMLAH	17.705.861.108	13.715.463.923	77.46%

B.2.3. Belanja Modal

Hingga 31 Desember 2017, terdapat realisasi belanja modal sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017

SKPD/UKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	669.374.200	552.033.507	82.47%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	14.036.000	11.300.000	80.51%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	16.637.500	13.910.000	83.61%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	26.781.248	18.040.000	67.36%
Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	21.120.000	19.972.000	94.56%
UPT Korpri	109.072.040	83.394.720	76.46%
JUMLAH	857.020.988	698.650.227	81.52%

Dari Rp.857.020.988,- anggaran yang di sediakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota untuk Belanja Modal, Rp.698.650.227,- atau 81,52% yang terealisasi hingga 31 Desember 2017.

C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan persediaan yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

a. Kas

Rincian saldo kas konsolidasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

REKAPITULASI KAS (KONSOLIDASI) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

KODE REKENING	URAIAN REKENING	BKD KONSOLIDASI	BKD PROVINSI	SUKU BADAN - JAKPUS	SUKU BADAN - JAKUT	SUKU BADAN - JAKBAR	SUKU BADAN - JAKSEL	SUKU BADAN - JAKTIM	UPT KORPRI
1	ASET								
1.1	ASET LANCAR								
1.1.1	Kas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.03.01	Sisa Uang Persediaan								
1.1.1.03.02	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor								
1.1.1.03.03	Pajak di SKPD yang Belum Disetor								
1.1.1.03.04	Uang Titipan								

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dinilai, dan dicatat sebesar nilai rupiahnya meliputi:

- Seluruh kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota Administrasi.

- Seluruh kas yang merupakan sisa uang muka kerja yang masih berada di bendahara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kepegawaian Kota Administrasi yang belum dipertanggungjawabkan/disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal neraca.
 - Seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetorkan ke kas daerah.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0.-.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH
1.1.6	Persediaan	520.657.074
	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	402.013.477
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	49.251.535
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	18.656.330
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	933.900
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	20.714.085
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	4.932.950
	UPT Korpri	24.154.797

Posisi persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.520.657.074,- merupakan sisa persediaan Alat Tulis Kantor. Persediaan ini dinilai dengan menggunakan harga perolehan yang berada di gudang persediaan BKD Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Kepegawaian Kota Administrasi.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2017 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 Badan Kepegawaian Daerah, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota adalah sebagai berikut:

KODE REK	URAIAN REKENING	BKD PROVINSI	SUKU BADAN - JAKBAR	SUKU BADAN - JAKPUS	SUKU BADAN - JAKSEL	SUKU BADAN - JAKTIM	SUKU BADAN - JAKUT	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
1.3	ASET TETAP								
1.3.1	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	8.859.955.009	1.031.118.709	480.683.500	531.129.500	641.558.586	359.210.493	1.678.838.146	13.582.493.943
1.3.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap								
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.592.130.137)	(964.469.838)	(388.549.300)	(488.631.000)	(543.689.424)	(318.669.349)	(1.080.005.176)	(10.376.144.224)
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET TETAP	2.267.824.872	66.648.871	92.134.200	42.498.500	138.984.612	40.541.144	598.832.970	3.247.465.169

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan pertama kali yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Terdapat penghapusan Mesin Absensi dan Printer sesuai risalah lelang No.387/26/2017 tanggal 12 Desember 2017 pada aset Suku Badan Kepegawaian Jakarta Utara sebesar Rp.21.859.750,-

C.3. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup aset takberwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Konsolidasi) Mempunyai aset rusak berat senilai Rp.1.264.080.141,- sebagai berikut :

URAIAN REKENING	BKD PROVINSI	SUKU BADAN - JAKBAR	SUKU BADAN - JAKPUS	SUKU BADAN - JAKSEL	SUKU BADAN - JAKTIM	SUKU BADAN - JAKUT	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
Aset Lainnya								
Aset Rusak Berat	1.214.421.541	42.398.600	-	7.260.000	-	-	-	1.264.080.141
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain								
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(739.230.896)	(25.760.000)	-	(7.260.000)	-	-	-	(772.250.896)
JUMLAH ASET LAINNYA	475.190.645	16.638.600	-	-	-	-	-	491.829.245

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp.6.979.489.841,- dan Rp.2.416.441.570,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut ini:

**Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1	Hutang Gaji/Tunjangan Pegawai	888.000	1.798.919.211
2	Hutang Asuransi JKK/JKM	879.324.822	-
3	Hutang Uang Duka Wafat	-	224.305.800
4.	Hutang Selisih Perubahan Premi JKK-JKM	6.033.277.019	
Jumlah		6.979.489.841	2.023.225.011

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki hutang kepada pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang belanja pegawai sebesar Rp.888.000,- terkait dengan kekurangan tunjangan fungsional pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebanyak 2 orang.
2. Hutang belanja pegawai sebesar Rp.879.324.822,- terkait dengan kekurangan pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian (JKK-JKM) bulan Desember 2017 kepada PT. Taspen.
3. Hutang belanja pegawai sebesar Rp.6.099.277.019,- terkait dengan selisih perubahan premi JKK-JKM Tahun 2017 kepada PT. Taspen.

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, UPT Korpri dan 5 Suku Badan Kepegawaian, yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Penyajian akun Ekuitas sejak tahun 2015 berbeda dengan penyajian di tahun-tahun sebelumnya, dimana sebelumnya Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Perubahan ini dikarenakan mulai tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menggunakan basis akrual pada penyusunan Laporan Keuangan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 di Neraca Konsolidasi sebesar Rp.(548.595.294.023),- adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH
3	EKUITAS	(2.719.538.353)
	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	(3.834.460.847)
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Barat	132.539.006
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan	61.154.830
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur	139.918.512
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara	61.255.229
	Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	97.067.150
	UPT Korpri	622.987.767

D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

D.1. Pendapatan LO

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri tidak memiliki anggaran Pendapatan LO pada Tahun 2017.

KODE REK.	URAIAN REKENING	BKD PROVINSI	SUKU BADAN - JAKBAR	SUKU BADAN - JAKPUS	SUKU BADAN - JAKSEL	SUKU BADAN - JAKTIM	SUKU BADAN - JAKUT	UPT KORPRI	BKD KONSOLIDASI
8	PENDAPATAN - LO								
9	BEBAN								
9.1	Beban Operasi								
9.1.01	Beban Pegawai	118.432.580.994	-	-	-	-	-	-	118.432.580.994
9.1.02	Beban Persediaan	620.746.461	38.245.034	61.373.763	92.869.980	98.811.575	45.910.820	1.157.739.958	2.115.697.591
9.1.03	Beban Barang	983.560.950	72.026.800	55.850.000	132.813.000	152.972.000	136.855.000	1.311.374.000	2.845.451.750
9.1.04	Beban Jasa	5.485.993.500	43.260.000	37.644.000	64.245.000	119.431.000	41.784.000	2.852.045.559	8.644.403.059
9.1.05	Beban Pemeliharaan	41.734.000	8.780.000	24.468.000	13.110.000	32.558.000	24.365.000	47.006.220	192.021.220
9.1.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.198.711.597	38.500.113	65.305.500	40.113.700	72.530.685	38.323.424	184.758.402	1.638.243.421
9.1.11	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.12	Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	126.763.327.502	200.811.947	244.641.263	343.151.680	476.303.260	287.238.244	5.552.924.139	133.868.398.035
	SURPLUS (DEFISIT) - LO	(126.763.327.502)	(200.811.947)	(244.641.263)	(343.151.680)	(476.303.260)	(287.238.244)	(5.552.924.139)	(133.868.398.035)

D.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2017 sebesar Rp.118.432.580.994,-. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2017 Rp.2.115.697.591,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang

Jumlah Beban Barang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2017 sebesar Rp.2.845.451.750,-. Beban Barang adalah konsumsi atas barang-barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2017 sebesar Rp.8.644.403.059,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.6. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta 5 Suku Badan Kepegawaian Kota dan UPT Korpri pada 31 Desember 2017 sebesar Rp.192.021.220,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 desember 2017 sebesar Rp.1.638.243.421,-. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari aset tetap dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, perubahan ekuitas, ekuitas akhir.

URAIAN REK.	BKD PROVINSI	SUKU BADAN - JAKBAR	SUKU BADAN - JAKPUS	SUKU BADAN - JAKSEL	SUKU BADAN - JAKTIM	SUKU BADAN – JAKUT	UPT Korpri	BKD KONSOLIDASI
EKUITAS AWAL								
Ekuitas - LO	1.375.080.059	177.061.054	148.751.903	82.456.110	205.823.057	73.673.498	34.473.879	2.097.319.560
RK PPKD	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH EKUITAS AWAL	1.375.080.059	177.061.054	148.751.903	82.456.110	205.823.057	73.673.498	34.473.879	2.097.319.560
PERUBAHAN EKUITAS								
Surplus/Defisit LO	(126.763.327.502)	(200.811.947)	(244.641.263)	(343.151.680)	(476.303.260)	(287.238.244)	(5.552.924.139)	(133.868.398.035)
Mutasi RK PPKD	121.553.786.596	156.289.899	192.956.510	324.072.400	410.398.715	274.819.975	6.139.518.028	129.051.842.123
Koreksi Ekuitas	-	-	-	(2.222.000)	-	-	1.919.999	(302.001)
Jumlah Perubahan Ekuitas	(5.209.540.906)	(44.522.048)	(51.684.753)	(21.301.280)	(65.904.545)	(12.418.269)	588.513.888	(4.816.857.913)
EKUITAS AKHIR								
Ekuitas - LO	(125.388.247.443)	(23.750.893)	(95.889.360)	(262.917.570)	(270.480.203)	(213.564.746)	(5.516.530.261)	(131.771.380.476)
RK PPKD	121.553.786.596	156.289.899	192.956.510	324.072.400	410.398.715	274.819.975	6.139.518.028	129.051.842.123
JUMLAH EKUITAS AKHIR	(3.834.460.847)	132.539.006	97.067.150	61.154.830	139.918.512	61.255.229	622.987.767	(2.719.538.353)

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 sebesar Rp.2.097.319.560,-.

E.2. Surplus / (Defisit) LO

Nilai (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp.(133.868.398.035,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Mutasi RK PPKD

Nilai Mutasi RK PPKD pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.129.051.842.123,-.

E.4. Koreksi Ekuitas

Nilai Koreksi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.(302.001),-.

E.5. Ekuitas akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.(2.719.538.353),-

F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah satu buah rekening di Bank DKI Kantor Cabang Utama Balakota dengan Nomor Rekening 108.02.0143.3 atas nama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.